



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 251751301010020

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	251751301010020	12-06-2025	13-06-2025	156,829,400.00	IDR	1	13-06-2025	156,829,400	NON GAJI KONTRAKTUAL	00645T/500100/2025	11-06-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Pusdatin Sesuai SPK Nomor SPK.03/A/05/05.048/2025 Tanggal 22 Mei 2025, BAST Nomor PPK.05/A/05/06.048/2025 Tanggal 5 Juni 2025, BAP Nomor PPK.06/A/05/06.048/2025 Tanggal 10 Juni 2025	Cek Akun	☐

YUNANTO DWI PRABOWO
NIP. 198706232014031002

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00645T

Tanggal : 10-Juni-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
500100.175.522119.11501WA.4356EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	963.103.0A.000524-Renewal Lisensi Virtual Meeting-Email-cPanel-aSEC-AD-IAG-SDWAN-IP Public dan Domain Website	177.633.300,00
	Jumlah	177.633.300,00
Jumlah		177.633.300,00

KOTA JAKARTA PUSAT
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

YUNANTO DWI PRABOWO
NIP 198706232014031002

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 5/27/25 10:47 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

500100

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier

NRS : 210843
SPAN Nama Supplier : GWEN TEKNO PRATAMA_0317845196429000
Nama Supplier : GWEN TEKNO PRATAMA
NPWP :
Nama Site : 2_40614

Informasi Bank

Nama Pihak Ketiga : GWEN TEKNO PRATAMA
Nama Bank : BPD JABAR BANTEN
No rekening :
Nama Pemilik Rekening : PT. GWEN TEKNO PRATAMA
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Annual Year :
CAN Multi Year :
Nilai Annual Year : 177.633.300,00
Satker : 500100 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
No. Kontrak : SPK.03/A/05/05.048/2025
No. RFC : 500100|2025|SPK.03/A/05/05.048/2025|0|2700059
Tanggal Kontrak : 22-May-2025
Tanggal Mulai Kontrak : 23-May-2025
Jangka Waktu Pemeliharaan : 0
Uang Muka :
Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-115.01.1.500100/2025;29-Nov-2024; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi :
Keterangan : Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025

Tanggal Selesai Kontrak : 05-Jun-2025
Tanggal Addendum :

Kategori PHLN :
Mata Uang SLA : Rupiah

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 5/27/25 10:47 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

500100

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM

Bank/Asuransi Penjamin UM :
Tanggal Jaminan :
Masa Berlaku :
Nomor Surat Jaminan UM :
Tanggal Mulai :
Tanggal Berakhirnya :
Bank/Asuransi Penjamin AT :
Tanggal Jaminan :
Masa Berlaku :
Nomor Surat Jaminan AT :
Tanggal Mulai AT :
Tanggal Berakhirnya :

Cara pembayaran : Sekaligus
Cara Pengembalian UM :
Cara Pemotongan Retensi :
Uang Muka :

KOTA JAKARTA PUSAT, 27 Mei 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

(YUNANTO DWI PRABOWO)

NIP 198706232014031002

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : SPK.03/A/05/05.048/2025

Tanggal : 22-Mei-2025

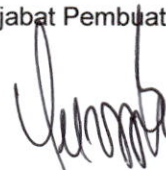
Halaman : 1 dari 1

No	No. Line Detail COA	Nilai
	Termin Pembayaran	
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
Line 1		
500100.175.522119.11501WA.4356EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		177.633.300,00
Pembayaran ke 1		
1	963.103.0A.000524-Renewal Lisensi Virtual Meeting-Email-cPanel-aSEC-AD-IAG-SDWAN-IP Public dan Domain Website	177.633.300,00
	Jumlah	177.633.300,00
Jumlah		177.633.300,00

JAKARTA PUSAT, 27-Mei-2025

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



YUNANTO DWI PRABOWO

NIP 198706232014031002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
NOMOR :000819/PDI/LS-P3/500100/V/2025

1. Kode Satuan Kerja : 500100
 2. Nama Satuan Kerja : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 3. Tgl. & No. DIPA : 21 FEBRUARI 2025, SP DIPA- 115.01.1.500100/2025 Rev. 1
 4. Klasifikasi Anggaran : WA.4356.EBA.52

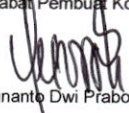
Yang bertandatangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (500100) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut:

No	Akun	Penerima	Uraian	Jumlah	Pajak		Pot. lain
					PPN	PPh	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	522119	PT. Gwen Tekno Pratama	Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025	177.633.300	17.603.300	3.200.600	0
Jumlah Akun 963.103.00A.00000000.522119				177.633.300	17.603.300	3.200.600	0
Total Jumlah				177.633.300	17.603.300	3.200.600	0

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 MEI 2025
 Pejabat Pembuat Komitmen


 Yunanto Dwi Prabowo, Se
 NIP. 198706232014031002

CEK LIST
KELENGKAPAN DOKUMEN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA
BAWASLU
TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN KEGIATAN : Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025

		VERIFIKATOR:	PPK/PPTK		PPSPM	
		TANGGAL :				
			ADA	TIDAK	ADA	TIDAK
KELENGKAPAN SYARAT DIBAWAH 50 JUTA	: KUITANSI					
	INVOICE					
	UNDANGAN					
	DAFTAR HADIR					
	DAFTAR KAMAR					
	BUKTI SETOR PAJAK					
	LAPORAN KEGIATAN					
	☐ LAINNYA					
DIATAS 50 JUTA	SURAT UNDANGAN PENUNJUKAN LANGSUNG		✓			
	PAKTA INTEGRITAS		✓			
	BA PENJELASAN		✓			
	BA EVALUASI		✓			
	BA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI		✓			
	PENETAPAN PEMENANG		✓			
	PENGUMUMAN PEMENANG		✓			
	SPMK		✓			
	SURAT PERJANJIAN/KONTRAK		✓			
	SYARAT UMUM KONTRAK		✓			
	SYARAT KHUSUS KONTRAK		✓			
	SPESIFIKASI BARANG/PEKERJAAN		✓			
	HPS		✓			
	SURAT PENUNJUKAN LANGSUNG		✓			
	SURAT PENAWARAN		✓			
	AKTA PERUSAHAAN		✓			
	SIUP		✓			
	NPWP REKANAN, REKENING KORAN		✓			
	FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI		✓			
	REKAM PAJAK PERUSAHAAN		✓			
	BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)		✓			
	BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)		✓			
	KUITANSI		✓			
	UNDANGAN					
	DAFTAR HADIR					
	DAFTAR KAMAR					
	BUKTI SETOR PAJAK					
	LAPORAN KEGIATAN					
	☐ LAINNYA					

		MENYETUJUI	PPK/PPTK	PPSPM
			NAMA	NAMA
CATATAN KHUSUS :				
		 Yunanto Dwi Prabowo NIP. 19870623 201403 1 002		

DAFTAR PENGAJUAN VERIFIKASI BERKAS KE BIRO KEUANGAN TAHUN 2025

Diisi oleh Pengelola Keuangan Bagian									Diisi oleh Pemegang Buku Kendali		Diisi oleh Verifikator Keuangan				Berkas Dikembalikan		
NO	BIRO/KEPALA/INSPEKTUR	LS PIHAK KE 3	NO DRAFT SPTB/ NO SPTB	NOMINAL SPTB	PAJAK	TGL/BLN/THN PENGAJUAN VERIFIKASI	JAM	PARAF PENGELOLA KEUANGAN (NAMA)	NO BUKTI BAGIAN	PARAF PEMERIKSA BUKU KENDALI (NAMA)	TGL/BLN/THN SELESAI VERIFIKASI	JAM	KETERANGAN VERIFIKASI		PARAF VERIFIKATOR KEUANGAN (NAMA)	TGL/BLN/THN PENGEMBALIAN BERKAS KE PENGELOLA KEUANGAN	PARAF PENERIMA BERKAS (NAMA)
													BELUM	SUDAH			
1	PUSDATIN	PT. Gwen Tekno Pratama	000819/PDI/LS-P3/500100/V/2025	177.633.300	PPN - 17.603.300 PPH - 3.200.600												
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

Ket :

1. Pengajuan Verifikasi diisi oleh Pengelola Keuangan Bagian Per-SPTB dalam 1 bantex
2. Pengajuan Verifikasi dibuat dalam rangkap 2 (masing-masing dipegang oleh Pengelola Keuangan dan Pemegang Buku Kendali)

JADWAL
PENGADAAN RENEWAL LICENSE VIRTUAL MEETING BAWASLU TAHUN 2025

NO	PENYELENGGARA	TAHAPAN	TANGGAL	NO. SURAT/DOKUMEN
1	PLT. KAPUSDATIN	Nota Dinas dari Kapusdatin ke PPK	Kamis, 1 Mei 2025	004/TI.00/KT/05/2025
2	PPK	Nota Dinas/Disposisi Proses Pengadaan	Jumat, 2 Mei 2025	PPK.01/A/05/05.048/2025
3	Kepala UKPBJ	Surat Tugas PP Proses Pengadaan	Senin, 5 Mei 2025	ST-UKPBJ/05/05.048/2025
4	PP	Nota Dinas Proses Pengadaan	Selasa, 6 Mei 2025	ND-01/PJP/05/05.048/2025
5	PP	Surat Permintaan Penawaran Pekerjaan (Surat Undangan PL Penyedia)	Rabu, 7 Mei 2025	UND/PJP/05/05.048/2025
6	PP	Berita Acara Penjelasan	Kamis, 8 Mei 2025	BA-01/PJP/05/05.048/2025
7	PENYEDIA	Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Surat Penawaran Harga	Jumat, 9 Mei 2025	037/PH-GTP/Q2/V/2025
8	PP	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran	Rabu, 14 Mei 2025	BA-02/PJP/05/05.048/2025
9	PP	Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi Penyedia	Kamis, 15 Mei 2025	BA-03/PJP/05/05.048/2025
10	PP	Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga	Jumat, 16 Mei 2025	BA-04/PJP/05/05.048/2025
11	PP	Berita Acara Penetapan Penyedia	Senin, 19 Mei 2025	BA-05/PJP/05/05.048/2025
12	PP	Nota Dinas Hasil Pemilihan Penyedia	Selasa, 20 Mei 2025	ND-02/PJP/05/05.048/2025
13	PP	Pengumuman	Selasa, 20 Mei 2025	PENG/PJP/05/05.048/2025
14	PPK	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	Rabu, 21 Mei 2025	PPK.02/A/05/05.048/2025
15	PPK	Surat Perintah Kerja (SPK)	Kamis, 22 Mei 2025	SPK.03/A/05/05.048/2025
16	PPK	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	Jumat, 23 Mei 2025	PPK.04/A/05/05.048/2025
17	PPK	Berita Acara Serah Terima (BAST)	Kamis, 5 Juni 2025	PPK.05/A/05/06.048/2025
18	PPK	Berita Acara Pembayaran (BAP)	Selasa, 10 Juni 2025	PPK.06/A/05/06.048/2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

NOMOR: PPK.01/A/05/05.048/2025

Yth. : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi
Hal : Permohonan Proses Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 2 Mei 2025

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa berupa Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025, dan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 929.000.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025, perlu segera dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prosedur yang telah ditetapkan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengadaan langsung, terlampir kami sampaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi,**



Yunanto Dwi Prabowo

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Bawaslu
2. Anggota Bawaslu
3. Sekretaris Jenderal
4. Deputi Bidang Administrasi Selaku KPA



TERM OF REFERENCE (TOR)
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PENGADAAN *RENEWAL LICENSE VIRTUAL MEETING* BAWASLU
TAHUN 2025**

PUSAT DATA DAN INFORMASI

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN *RENEWAL LICENSE VIRTUAL MEETING* BAWASLU TAHUN 2025

I. DASAR HUKUM

- A. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- B. Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- D. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilu;
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- F. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
- H. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- I. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
- J. Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3980);
- K. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- L. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Panitia Pengawas Tempat Pemilihan Umum; dan
- M. DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-115.01.1.500100/2025.

II. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2020, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh dunia semakin meningkat di tengah pandemi Covid-19 yang membatasi gerak dan jarak sosial. Pertemuan atau rapat secara virtual menjadi tren di seluruh dunia untuk membatasi penyebaran virus corona. Namun, lambat laun hal ini juga menjadi sebuah kebiasaan baru (*new normal*) dimana penyelenggaraan rapat ataupun kegiatan-kegiatan pertemuan secara daring menjadi sebuah hal yang lazim diselenggarakan.

Begitu juga yang terjadi di sektor pemerintahan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang membutuhkan pembahasan-pembahasan secara cepat dan lintas ruang, kebutuhan akan *virtual meeting* menjadi meningkat. Utamanya antara jajaran Bawaslu RI bersama lembaga-lembaga lain, maupun Bawaslu RI dengan jajaran di daerah yang bersifat permanen di lingkup Kabupaten/Kota, maupun di lingkup *ad hoc* mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa.

Agar tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsi layanan di lingkungan Bawaslu, dibutuhkan sarana kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan teknis maupun administrasi melalui rapat luring (*virtual meeting*), *meeting conference*, dan bimbingan teknis secara luring.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

- a. Melaksanakan Pengadaan *Renewal License Virtual Meeting* Bawaslu Tahun 2025; dan
- b. Mendukung tugas dan fungsi layanan pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

B. Tujuan

Aplikasi yang mempunyai fungsionalitas yang dapat membantu user dalam melakukan diskusi tatap muka secara *conference*, meliputi:

- a. Memudahkan *user* melakukan diskusi tatap muka dengan satu atau lebih *user* melalui *meeting conference*;
- b. Memudahkan komunikasi antar *user* dengan adanya pengiriman pesan teks.
- c. Memudahkan *user* dalam melakukan pengadaan *meeting conference* dengan membuat jadwal *meeting* yang dapat mengundang *user* lain.

- d. Jadwal disinkronisasikan dengan kalender yang terdapat dalam *smartphone user* sehingga membantu mengingatkan *user* mengenai jadwal *meeting conference* yang akan dilaksanakan;
- e. Memudahkan *user* untuk melakukan penjelasan materi berupa *slide* yang digunakan untuk diskusi dalam *meeting conference*;
- f. Membantu *user* untuk melakukan penjelasan secara visual pada *slide* dengan memberika coretan–coretan pada saat diskusi dalam *meeting conference*;
- g. Memudahkan *user* yang menjadi moderator untuk mengatur hak berbicara peserta dalam diskusi pada *meeting conference* sehingga mengatasi masalah dimana setiap peserta diskusi dapat berbicara secara bersamaan; dan
- h. Memudahkan *user* dalam melakukan pembicaraan pribadi dalam bentuk teks dengan peserta lain pada saat *virtual meeting* sedang berlangsung

IV. TARGET/SASARAN

Target/saran yang ingin dicapai dalam Pengadaan *Renewal License Virtual Meeting* Bawaslu Tahun 2025 adalah:

- A. Tercapainya optimalisasi Layanan infrastruktur TIK dalam layanan rapat luring; dan
- B. Tercapainya *performance* terbaik infrastruktur TIK dalam layanan operasional yang berkesinambungan.

V. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

- A. K/L/D/I : Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
- B. Satker : Sekretariat Jenderal Bawaslu RI
- C. PPK : Yunanto Dwi Prabowo, S.E.

VI. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- A. Sumber dana yang diperlukan untuk Pengadaan *Renewal License Virtual Meeting* Bawaslu Tahun 2025 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu nomor: SP DIPA-115.01.1.500100/2025;
- B. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp.178.266.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- C. Rincian perkiraan harga sebagai berikut:

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025					
1	Zoom One Business Annual	13	Paket	4.800.000	62.400.000
2	Zoom Rooms Annual	1	Paket	12.400.000	12.400.000
3	1000 Participants Meeting Annual	3	Paket	24.600.000	73.800.000
4	Services: • Installation • Troubleshooting • Commissioning • Provisioning • 1 Year Warranty	1	Paket	12.000.000	12.000.000
Sub Total :					160.600.000
PPN :					17.666.000
Grand Total :					178.266.000

VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan *Renewal License Virtual Meeting* Bawaslu Tahun 2025 selama 14 (empat belas) hari kalender, adapun jangka waktu untuk pemeliharaan/*maintenance* selama 1 (satu) tahun.

A. Target yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan:

License Virtual Meeting harus sudah diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

B. Kualitas hasil produksi sesuai yang ditetapkan:

- Lisensi resmi dari *principal*; dan
- Garansi resmi dari *principal/distributor*

VIII. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi Pengadaan *Renewal License Virtual Meeting* yang akan dibutuhkan, meliputi:

No	Spesifikasi
1	Zoom One Business Annual (300 Participants)
2	Zoom Rooms Annual
3	1000 Participants Meeting Annual
4	Services: • Installation • Troubleshooting • Commissioning • Provisioning • 1 Year Warranty

IX. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Pengadaan *Renewal License Virtual Meeting* Bawaslu Tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

A. Fungsi/kegunaan *License*

Virtual Meeting adalah layanan *video conference* yang memungkinkan pengguna untuk melakukan obrolan daring dengan memanfaatkan teknologi *cloud computer* dan keamanan 256-bit TLS encryption.

Fungsi/kegunaan *Virtual Meeting* meliputi:

- a. Menyediakan pilihan untuk durasi berlangganan per tahun atau lebih dari 1 tahun (multi-years) dan bisa dilakukan perpanjangan secara otomatis.
- b. Mendukung perangkat *mobile* berbasis Android dan iOS
- c. Mendukung perangkat *computer* dengan *system* operasi Windows, macOS, Linux
- d. Platform mendukung browser IE, Edge, Firefox, Chrome, Safari
- e. Mendukung 10 meeting pada waktu yang bersamaan
- f. Mendukung penambahan sampai dengan 1000 partisipan untuk 1 sesi konferensi video.
- g. Mendukung 1000 attendee dalam 1 sesi webinar
- h. Mendukung *software based room system* sebanyak 1 lisensi
- i. Mendukung fitur perekaman konferensi video di media penyimpanan lokal dan cloud
- j. Mendukung fitur kustomisasi branding vanity url
- k. Mendukung fitur hanya peserta rapat yang sudah memiliki username dan password yang dapat ikut serta dalam rapat.
- l. Mendukung penjadwalan dengan mode enhanced encryption atau end-to-end encryption
- m. Memiliki dukungan enkripsi *end-to-end* (E2EE) memenuhi standar FERPA/HIPAA dan 256-bit AES encryption
- n. Mendukung penyiaran melalui youtube dan facebook

A. Persyaratan lainnya, meliputi:

- a. cara pemasangan/pengoperasian/penggunaan

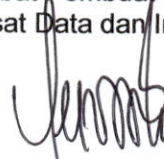
Penyedia jasa melakukan proses *aktivasi license* pada *email* instansi hingga dapat digunakan sesuai dengan fungsinya secara optimal

b. Dukungan Teknis

Penyedia Jasa menyediakan layanan *Remote Support* on call 8x5 dan *Remote Support and event assist* selama 1 (satu) tahun.

Jakarta, 2 Mei 2025

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi,

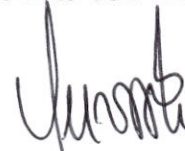


Yunanto Dwi Prabowo, S.E.
NIP. 19870623 201403 1 002

RINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN RENEWAL LICENSE VIRTUAL MEETING BAWASLU TAHUN 2025

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025					
1	Zoom One Business Annual	13	Paket	4.800.000	62.400.000
2	Zoom Rooms Annual	1	Paket	12.400.000	12.400.000
3	1000 Participants Meeting Annual	3	Paket	24.600.000	73.800.000
4	Services: • Installation • Troubleshooting • Commissioning • Provisioning • 1 Year Warranty	1	Paket	12.000.000	12.000.000
Sub Total :					160.600.000
PPN :					17.666.000
Grand Total :					178.266.000

**Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi,**



Yunanto Dwi Prabowo

SURAT TUGAS

NOMOR: ST-UKPBJ/05/05.048/2025

KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Menimbang : Dalam rangka Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025, dipandang perlu menugaskan Pejabat Pengadaan untuk memproses pengadaan dimaksud.

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
2. Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
3. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

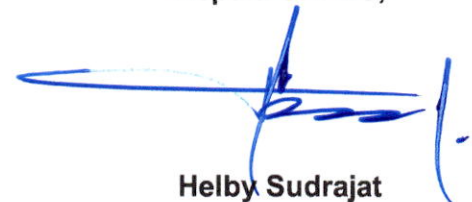
Menugaskan

Kepada : Helby Sudrajat
NIP. 19890924 201503 1 004

Untuk : 1. Melaksanakan proses Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025 pada Pusat Data dan Informasi;
2. Melaporkan hasilnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait melalui Kepala UKPBJ;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 5 Mei 2025

Kepala UKPBJ,



Helby Sudrajat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS

NOMOR: ND-01/PJP/05/05.048/2025

Yth. : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi
Dari : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Hal : Proses Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025
Lampiran : -
Tanggal : 6 Mei 2025

Sebagai tindak lanjut Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi Nomor PPK.01/A/05/05.048/2025 tanggal 2 Mei 2025 Hal Permohonan Proses Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan jadwal pelaksanaan pengadaan tersebut:

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal
1	Undangan Ke Calon Penyedia	Rabu, 7 Mei 2025
2	Pemberian Penjelasan	Kamis, 8 Mei 2025
3	Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Penawaran Harga	Jumat, 9 Mei 2025
4	Pembukaan Dokumen Penawaran	Rabu, 14 Mei 2025
5	Evaluasi Kualifikasi Penyedia	Kamis, 15 Mei 2025
6	Negosiasi Teknis dan Harga	Jumat, 16 Mei 2025
7	Penetapan Penyedia	Senin, 19 Mei 2025

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,


Helby Sudrajat

Nomor : UND/PJP/05/05.048/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Pemasukan Penawaran

Jakarta, 7 Mei 2025

Yth.

PT. Gwen Tekno Pratama

Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung,
Jawa Barat 40275

Dengan ini PT. Gwen Tekno Pratama kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung Paket Pekerjaan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025
Nilai total HPS : Rp.178.266.000,-
Sumber pendanaan : DIPA BAWASLU Tahun Anggaran 2025

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Bawaslu RI, Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat
Telp/Fax : 021-3905889 / 3907911
Website : www.bawaslu.go.id

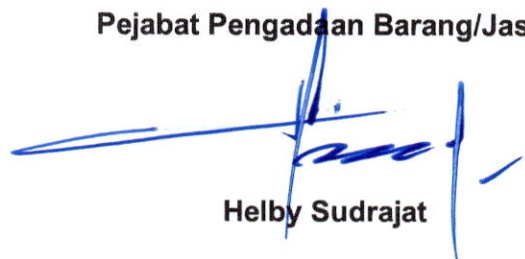
Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal
1	Pemberian Penjelasan	Kamis, 8 Mei 2025
2	Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Penawaran Harga	Jumat, 9 Mei 2025
3	Pembukaan Dokumen Penawaran	Rabu, 14 Mei 2025
4	Evaluasi Kualifikasi Penyedia	Kamis, 15 Mei 2025
5	Negosiasi Teknis dan Harga	Jumat, 16 Mei 2025
6	Penetapan Penyedia	Senin, 19 Mei 2025
7	Penandatanganan SPK (Surat Perintah Kerja)	Kamis, 22 Mei 2025

Apabila Saudara memerlukan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,



Helby Sudrajat

BERITA ACARA PENJELASAN

NOMOR: BA-01/PJP/05/05.048/2025

Pada hari ini KAMIS tanggal DELAPAN bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (08-05-2025), yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan di Badan Pengawas Pemilihan Umum, telah dilaksanakan penjelasan dokumen Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pengadaan ini Termasuk Kategori Pengadaan Langsung.
2. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran yaitu:
 - a. Surat Penawaran;
 - b. Formulir Isian Kualifikasi;
 - c. Legalitas Perusahaan;
 - d. KTP;
 - e. FC NPWP.
3. Penawaran disampaikan paling lambat 9 Mei 2025.

Demikian berita acara ini dibuat, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

PT. Gwen Tekno Pratama,



Ria Anengsih Destika
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,



Helby Sudrajat
NIP. 19890924 201503 1 004

FORMULIR KUALIFIKASI

PENGADAAN RENEWAL LICENSE VIRTUAL MEETING
BAWASLU TAHUN 2025

SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Anengsih Destika
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : PT. Gwen Tekno Pratama
Alamat Perusahaan : Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec.
Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pekerjaan Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025 sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Bandung, 9 Mei 2025

PT. Gwen Tekno Pratama,



Ria Anengsih Destika
Direktur

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur PT. Gwen Tekno Pratama, akan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bandung, 9 Mei 2025

PT. Gwen Tekno Pratama,



Ria Anengsih Destika

Direktur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Anengsih Destika
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : PT. Gwen Tekno Pratama
Alamat Perusahaan : Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec.
Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275

Menyatakan tidak akan menuntut kepada Panitia/Pejabat Pengadaan maupun pemberi pekerjaan apabila terjadi perubahan kebijakan pada anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Bandung, 9 Mei 2025

PT. Gwen Tekno Pratama,



Ria Anengsih Destika
Direktur

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Anengsih Destika
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : PT. Gwen Tekno Pratama
Alamat Perusahaan : Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
Telepon : 022-73512118
Email : info@gwen.id

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Perusahaan : PT. Gwen Tekno Pratama
2. Status : ☒ Pusat ☐ Cabang
3. Alamat : Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
4. No. Telepon : 022-73512118
No. Fax : -
E-Mail : info@gwen.id

B. Izin Usaha

1. No. Induk Berusaha : 9120113212471
2. Masa berlaku izin usaha : Seumur Hidup
3. Instansi pemberi izin usaha : Badan Koordinasi Penanaman Modal

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV
 - a. Nomor Akta : 20
 - b. Tanggal : 3 Mei 2013
 - c. Nama Notaris : Iman Taufan Djamal, S.H., M.Kn.
2. Akta Perubahan PT
 - a. Nomor Akta : 13
 - b. Tanggal : 13 Maret 2023
 - c. Nama Notaris : Susyana Herlawati, S.H., M.Kn

D. Pengurus

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Jaenudin	Komisaris Utama

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Ruri Ekawanda	Direktur Utama
2.	Ria Anengsih Destika	Direktur

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No	Nama	Saham (1/Rp.1.000.000)
1.	Ruri Ekawanda	310
2.	Ria Anengsih Destika	45
3.	Jaenudin	45
TOTAL		400

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	0000000000000000000
b. Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir	:	Terlampir
c. Laporan Bulanan PPh Tiga bulan terakhir	:	Terlampir

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bandung, 9 Mei 2025

PT. Gwen Tekno Pratama,


Ria Anengsih Destika
 Direktur

Nomor : 037/PH-GTP/Q2/V/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penawaran Harga

Bandung, 9 Mei 2025

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi Bawaslu
di-
Jakarta

Sehubungan dengan undangan Pemasukan Penawaran Pengadaan Nomor: UND/PJP/05/05.048/2025 tanggal 7 Mei 2025 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025 sebesar **Rp.177.933.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).**

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Daftar Kuantitas dan Harga,
2. Dokumen penawaran teknis yaitu Spesifikasi teknis;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli. Dengan disampaiakannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Hormat Kami
PT. Gwen Tekno Pratama,


Ria Anengsih Destika
Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA PENAWARAN

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025					
1	Zoom One Business Annual	13	Paket	4.800.000	62.400.000
2	Zoom Rooms Annual	1	Paket	12.400.000	12.400.000
3	1000 Participants Meeting Annual	3	Paket	24.500.000	73.500.000
4	Services: • Installation • Troubleshooting • Commissioning • Provisioning • 1 Year Warranty	1	Paket	12.000.000	12.000.000
Sub Total :					160.300.000
PPN :					17.633.000
Grand Total :					177.933.000



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0100407.AH.01.02.TAHUN 2019**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT GWEN TEKNO PRATAMA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUSYANA HERLAWATI S.H., M.KN sesuai salinan akta nomor 22 Tanggal 22 November 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT GWEN TEKNO PRATAMA tanggal 25 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019112532260921 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT GWEN TEKNO PRATAMA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT GWEN TEKNO PRATAMA - dengan NPWP 317845196429000 yang berkedudukan di KOTA BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 22 Tanggal 22 November 2019 yang dibuat oleh Notaris SUSYANA HERLAWATI S.H., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Desember 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 04 Desember 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0232342.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 02 Desember 2019



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)



NOMOR TDP 101114624138	BERLAKU S/D TANGGAL 9 NOVEMBER 2022	0	0
---------------------------	--	---	---

NAMA PERUSAHAAN	: PT.GWEN TEKNO PRATAMA
STATUS	: PUSAT
ALAMAT PERUSAHAAN	: JALAN GEMINI NO. 22 RT. 02 RW. 09 KELURAHAN GUMURUH, KECAMATAN BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG
NOMOR TELEPON	: 022-73512118 FAX: 022-73512118
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG:	RIA ANENGSIH DESTIKA
<u>KEGIATAN USAHA POKOK :</u> <u>KBLI : 46100</u>	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK



Bandung, 9 November 2017
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Dr. Hj. EVI SYAEFINI SHALEHA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19581228 197804 2 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
3. Camat Batununggal Kota Bandung.

Dicetak pada Tanggal 13 Bulan November Tahun 2017



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG**

NOMOR: 0156/IUP-UB/V/2018/DPMTSP

**TENTANG
IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL**

NAMA PERUSAHAAN	: PT GWEN TEKNO PRATAMA
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: RIA ANENGSIH DESTIKA, DIREKTUR
ALAMAT PERUSAHAAN	: JALAN GEMINI NO. 22 RT. 002 RW. 009 KELURAHAN GUMURUH, KECAMATAN BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG
NOMOR TELEPON	: 022-73512118 FAX:
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp. 225.000.000,-
KEGIATAN USAHA	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
KELEMBAGAAN	: PEMASOK
BIDANG USAHA (KBLI)	: 4610, 4651, 7020, 6209.
BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	: ALAT/PERALATAN/SUKU CADANG/HASIL INDUSTRI : KESELAMATAN ANGKUTAN DARAT, UDARA, LAUT, RADIO, ASPAL, KENDARAAN BERMOTOR, ALAT BERAT, ELEKTRONIKA, TULIS KANTOR, PERLENGKAPAN PEGAWAI, KANTOR, KONVEKSI, PAKAIAN JADI, TEKSTIL, BARANG CETAKAN, TELEKOMUNIKASI, TEKNIK, PERAGA PENDIDIKAN, VISUALISASI, OLAH RAGA, KESEHATAN, KEDOKTERAN, PEMADAM KEBAKARAN, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, TRANSMISI, LISTRIK, SURVEY, LABORATORIUM, TIMBANGAN KHUSUS, MEUBELAIR, KONSTRUKSI, BAHAN BANGUNAN, PIRANTI LUNAK DAN KERAS, KOMPUTER, PUPUK (NON SUBSIDI), OBAT- OBATAN (NON RACIKAN), HASIL/ BIBIT/USAHA : PERTANIAN, PERTERNAKAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANAMAN, PERTAMBANGAN, PAKAN TERNAK, BAHAN PANGAN, JASA : TELEMATIKA, KONSULTAN BISNIS MANAJEMEN, TEKNOLOGI INFORMATIKA, INSTALASI (AIR, LISTRIK, GAS, TELKOM), PENGANTARAN BARANG (TIDAK MENIMBUN), PERAWATAN DAN PEMASANGAN KOMPUTER, CATERING, CLEANING SERVICE, PEMASARAN PERUMAHAN, PERIKLANAN, PENYEWAAN RUANGAN.
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.	
PADA SAAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI DITETAPKAN, IZIN USAHA PERDAGANGAN NOMOR : 0002/IUP/XI/2017/DPMTSP TANGGAL 01-11-2017 DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.	

Bandung, 30 Mei 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina Tk. 002
NIP. 19690111 199603 1 002

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
3. Camat Batununggal Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmtsp.bandung.go.id>, resi: 98F1D9





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan	:	PT GWEN TEKNO PRATAMA
Nomor Induk Berusaha	:	9120113212471
Alamat Perusahaan	:	JL. GEMINI NO. 22, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran KBLI
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran KBLI
Barang / Jasa Dagangan Utama	:	Alat/Peralatan/Suku Cadang/Hasil Industri : Tulis Kantor, Perlengkapan Pegawai, Kantor, Konveksi, Pakaian Jadi, Tekstil, Barang Cetak, Telekomunikasi, Teknik, Peraga Pendidikan, Visualisasi, Olah Raga, Kesenian, Kesehatan, Kedokteran, Farmasi, Perabot Rumah Tangga, Pemadam Kebakaran, Mekanikal, Elektrikal, Transmisi, Listrik, Ukur, Survei, Laboratorium, Timbangan Khusus, Mebeulair, Konstruksi, Bahan Bangunan, Piranti Lunak dan Keras, Komputer, Alat Konstruksi, Alat Berat, Generator Set, Migas, Hidrant, Pupuk (non subsidi), Obat-obatan (non racikan), Hasil/Bibit/Usaha : Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Pertamanan, Pertambangan, Pakan Ternak, Bahan Pangan, Keperluan Sehari-hari, Keselamatan Angkutan Darat, Laut, Udara, Radio, Aspal, Bahan Kimia (Non Peledak/B2), Kendaraan Bermotor, Alat Perbengkelan, Makanan dan Minuman Ringan (Non Alkohol), Bahan Makanan, Alat Berat, Migas, Batubara, Oli, Fumigasi, Vulkanologi, Elektronika, BBM, Jasa : Telematika, Teknologi Informasi, Catering, Cleaning Service, Sewa (Gedung, Ruang Kantor, Alat Pesta, Kendaraan), Konsultan Bisnis Manajemen, Teknologi Informatika, Instalasi (Air, Gas, Listrik, Telkom), Pengantaran Barang (Tidak Menimbun), Perawatan dan Pemasangan Komputer, AC, Elektronika, Periklanan, Pemasaran Perumahan, Perbaikan Mesin, ALat laboratorium, Kendaraan Bermotor.
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	JL GEMINI NO. 22
- Desa/Kelurahan	:	Gumuruh
- Kecamatan	:	Batununggal
- Kabupaten/Kota	:	Kota Bandung
- Provinsi	:	Jawa Barat



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH** berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 27 Desember 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120113212471**

Lampiran KBLI

No.	Judul KBLI	Kode KBLI
1	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	46100
2	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	46511
3	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	46591
4	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	46523
5	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	46599
6	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	46521
7	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK	46512

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120113212471**

Lampiran KBLI

No.	Judul KBLI	Kode KBLI
1	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	47411
2	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	47413
3	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	47414
4	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	47415
5	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	47420
6	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN	47726
7	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	47920

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : [REDACTED]

PT. GWEN TEKNO PRATAMA

JL. GEMINI NO. 22 RT. 002 RW. 009
GUMURUH BATUNUNGGAL

KPP MADYA DUA BANDUNG

Terdaftar : 17 Juni 2013



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I
KPP PRATAMA BANDUNG KAREES
JL. IBRAHIM ADJIE 372 (D/H JL. KIARA CONDONG), BANDUNG
TELEPON 022-7333355, 7333180 FAKSIMILE 022-7337015 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-222PKP/WPJ.09/KP.0403/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : ~~XXXXXXXXXX~~
2. Nama : PT. GWEN TEKNO PRATAMA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS
JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JL. GEMINI NO. 22 RT. 002 RW. 009
GUMURUH BATUNUNGGAL
KOTA BANDUNG JAWA BARAT
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : ☒ PPN ☐ PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 15 Juli 2013.

Bandung, 19 Juli 2018
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

ASEP WINDO HERWINDO
NIP.197310161999031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I
KPP PRATAMA BANDUNG KAREES
JL. IBRAHIM ADJIE 372 (D/H JL. KIARA CONDONG), BANDUNG
TELEPON 022-7333355, 7333180 FAKSIMILE 022-7337015 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-6633KT/WPJ.09/KP.0403/2018

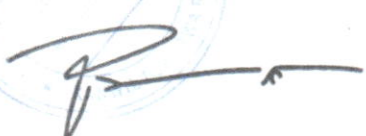
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. GWEN TEKNO PRATAMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : XXXXXXXXXX
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JL. GEMINI NO. 22 RT. 002 RW. 009
GUMURUH BATUNUNGGAL
KOTA BANDUNG JAWA BARAT
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 17 Juni 2013
7. Kewajiban Pajak :

<p>PPh Sendiri:</p> <p>☒ PPh Pasal 25</p> <p>☐ PPh Pasal 25 OPPT</p> <p>☒ PPh Pasal 29</p> <p>☒ PPh Final</p> <p>PPN:</p> <p>☒ Pemungutan PPN</p> <p>☐ PPN Kegiatan Membangun Sendiri</p>	<p>Pemotongan dan Pemungutan PPh:</p> <p>☒ PPh Pasal 4 ayat (2)</p> <p>☒ PPh Pasal 15</p> <p>☒ PPh Pasal 19</p> <p>☒ PPh Pasal 21</p> <p>☐ PPh Pasal 22</p> <p>☐ PPh Pasal 23</p> <p>☒ PPh Pasal 26</p>
---	---

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 17 Juli 2018.

Bandung, 19 Juli 2018
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan


ASEP WINDO HERWINDO
NIP.197310161999031002

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : [REDACTED]

Nama : RIA ANENGSIH DESTIKA

Tempat/Tgl Lahir : [REDACTED]

Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : A

Alamat : [REDACTED]

RT/RW : [REDACTED]

Kel/Desa : [REDACTED]

Kecamatan : [REDACTED]

Agama : ISLAM

Status Perkawinan : BELUM KAWIN

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA BANDUNG
03-11-2017





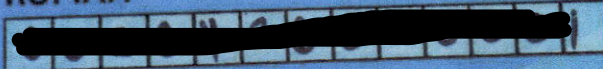
PT. GWEN TEKNO PRATAMA

**bank bjb**

KANTOR CABANG S. PARMAN
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 19
Jakarta Barat
www.bankbjb.co.id

NAMA : GWEN TEKNO PRATAMA PT

REK. GIRO : RUPIAH



VALAS



Nama : Gwen Tekno Pratama

No. Rekening : 

Kantor Cabang S. Parman
Jakarta Barat

BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

NOMOR: BA-04/PJP/05/05.048/2025

Pada hari ini JUMAT tanggal ENAM BELAS bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (16-05-2025), kami yang bertandatangan dibawah ini Pejabat Pengadaan di Badan Pengawas Pemilihan Umum, telah mengadakan negosiasi teknis dan harga terhadap surat penawaran harga dari PT. Gwen Tekno Pratama Nomor: 037/PH-GTP/Q2/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 untuk Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025. Kedua belah pihak telah sepakat dengan teknis yang ditawarkan, dan selanjutnya negosiasi harga telah dilakukan sebagai berikut:

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025					
1	Zoom One Business Annual	13	Paket	4.800.000	62.400.000
2	Zoom Rooms Annual	1	Paket	12.400.000	12.400.000
3	1000 Participants Meeting Annual	3	Paket	24.600.000	73.800.000
4	Services: • Installation • Troubleshooting • Commissioning • Provisioning • 1 Year Warranty	1	Paket	12.000.000	12.000.000
Sub Total :					160.600.000
PPN :					17.666.000
Grand Total :					178.266.000

2. Harga Penawaran

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025					
1	Zoom One Business Annual	13	Paket	4.800.000	62.400.000
2	Zoom Rooms Annual	1	Paket	12.400.000	12.400.000
3	1000 Participants Meeting Annual	3	Paket	24.500.000	73.500.000
4	Services: • Installation • Troubleshooting • Commissioning • Provisioning • 1 Year Warranty	1	Paket	12.000.000	12.000.000
Sub Total :					160.300.000
PPN :					17.633.000
Grand Total :					177.933.000

3. Hasil Negosiasi Harga

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025					
1	Zoom One Business Annual	13	Paket	4.800.000	62.400.000
2	Zoom Rooms Annual	1	Paket	12.280.000	12.280.000
3	1000 Participants Meeting Annual	3	Paket	24.450.000	73.350.000
4	Services: • Installation • Troubleshooting • Commissioning • Provisioning • 1 Year Warranty	1	Paket	12.000.000	12.000.000
Sub Total :					160.030.000
PPN :					17.603.300
Grand Total :					177.633.300

Berdasarkan hasil Negosiasi Teknis dan Harga tersebut, maka Pejabat Pengadaan mempertimbangkan dan mengusulkan pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

Nama Penyedia : PT. Gwen Tekno Pratama
Alamat : Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
NPWP : ██████████
Biaya Pelaksanaan : Rp.177.633.300,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah)

Demikian berita acara ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, agar dapat dipergunakan semestinya.

PT. Gwen Tekno Pratama,



Ria Anengsih Destika
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,



Helby Sudrajat
NIP. 19890924 201503 1 004

BERITA ACARA PENETAPAN PENYEDIA

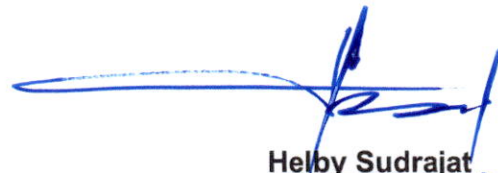
NOMOR: BA-05/PJP/05/05.048/2025

Pada hari ini SENIN tanggal SEMBILAN BELAS bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (19-05-2025), yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan di Badan Pengawas Pemilihan Umum menetapkan penyedia Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025, sebagai berikut:

Nama : PT. Gwen Tekno Pratama
Alamat : Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
NPWP : XXXXXXXXXX-XX-XX-XX
HPS : Rp.178.266.000,-
(Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)
Nilai Penawaran : Rp.177.933.000,-
(Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Biaya Pelaksanaan : Rp.177.633.300,-
(Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah)

Demikian Penetapan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,



Helby Sudrajat
NIP. 19890924 201503 1 004

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

NOMOR: ND-02/PJP/05/05.048/2025

Yth. : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi
Dari : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Hal : Hasil Pemilihan Penyedia Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025
Lampiran : -
Tanggal : 20 Mei 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi Nomor: PPK.01/A/05/05.048/2025 tanggal 2 Mei 2025 Hal Permohonan Proses Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025, bersama ini kami laporkan hasil pemilihan penyedia pengadaan tersebut:

Nama : PT. Gwen Tekno Pratama
Alamat : Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
NPWP : 
HPS : Rp.178.266.000,-
(Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)
Nilai Penawaran : Rp.177.933.000,-
(Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Biaya Pelaksanaan : Rp.177.633.300,-
(Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,



Helby Sudrajat
NIP. 19890924 201503 1 004

Tembusan, Yth.:
Kepala UKPBJ Bawaslu

BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

NOMOR: BA-02/PJP/05/05.048/2025

Pada hari ini RABU tanggal EMPAT BELAS bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (14-05-2025), telah dilakukan pembukaan dokumen penawaran dalam rangka Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025 oleh Pejabat Pengadaan di hadapan peserta/penyedia yang memasukkan Dokumen Penawaran, sebagai berikut:

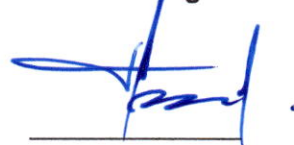
No	Nama Penyedia Jasa	Nilai Penawaran
1.	PT. Gwen Tekno Pratama	Rp.177.933.000,- (termasuk pajak)

Dari penyedia yang memasukkan Dokumen Penawaran, dokumen dinyatakan lengkap.

Demikian berita acara ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pejabat Pengadaan

No	Nama	NIP
1	Helby Sudrajat	19890924 201503 1 004

Tanda Tangan**Saksi dari Penyedia Jasa**

No	Nama	Jabatan
1	Ria Anengsih Destika	Direktur

Tanda Tangan

BERITA ACARA HASIL EVALUASI KUALIFIKASI PENYEDIA

NOMOR: BA-03/PJP/05/05.048/2025

Pada hari ini KAMIS tanggal LIMA BELAS bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (15-05-2025), yang bertandatangan dibawah ini Pejabat Pengadaan di Badan Pengawas Pemilihan Umum, telah mengadakan Evaluasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Evaluasi Penawaran:

a. Koreksi Aritmatik

Nama Penyedia	Nilai Penawaran	Koreksi Aritmatik
PT. Gwen Tekno Pratama	Rp.177.933.000	Rp.177.933.000

b. Evaluasi Administrasi

Nama Penyedia	Hasil Evaluasi Administrasi	Keterangan
PT. Gwen Tekno Pratama	Memenuhi Syarat	Lulus

c. Evaluasi Teknis

Nama Penyedia	Hasil Evaluasi Teknis	Keterangan
PT. Gwen Tekno Pratama	Memenuhi Syarat	Lulus

d. Evaluasi Harga

Nama Penyedia	Hasil Evaluasi Harga	Keterangan
PT. Gwen Tekno Pratama	Memenuhi Syarat	Lulus

2. Evaluasi Kualifikasi:

Nama Penyedia	Hasil Evaluasi Kualifikasi	Keterangan
PT. Gwen Tekno Pratama	Memenuhi Syarat	Lulus

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

**Helby Sudrajat**
NIP. 19890924 201503 1 004

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG/PJP/05/05.048/2025

Diumumkan bahwa, hasil proses Pengadaan:

Nama Pekerjaan : Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 23 Mei s.d 5 Juni 2025
HPS : Rp.178.266.000,-
(Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)
Tahun Anggaran : 2025

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Penyedia Nomor: BA-05/PJP/05/05.048/2025 tanggal 19 Mei 2025, maka Pejabat Pengadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengumumkan pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah:

Nama : PT. Gwen Tekno Pratama
Alamat : Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
NPWP : XXXXXXXXXX
Nilai Penawaran : Rp.177.933.000,-
(Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Biaya Pelaksanaan : Rp.177.633.300,-
(Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah)

Hasil Evaluasi Penawaran:

Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	Evaluasi Kualifikasi
LULUS	LULUS	Harga Penawaran dibawah HPS	Memenuhi syarat

Demikian pengumuman disampaikan, agar dapat diketahui khalayak umum.

Jakarta, 20 Mei 2025

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,



Helby Sudrajat
NIP. 19890924 201503 4 004

Nomor : PPK.02/A/05/05.048/2025

Jakarta, 21 Mei 2025

Lampiran : -

Hal : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Yth.

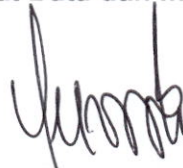
PT. Gwen Tekno Pratama

Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung,
Jawa Barat 40275

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil proses pemilihan penyedia Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025 tanggal 23 Mei s.d 5 Juni 2025, nilai penawaran Saudara setelah negosiasi sebesar Rp.177.633.300,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) termasuk pajak kami nyatakan diterima.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku beserta petunjuknya teknisnya.

**Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi,**



Yunanto Dwi Prabowo
NIP. 19870623 201403 1 002

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Nomor dan Tanggal SPK: SPK.03/A/05/05.048/2025 Tanggal 22 Mei 2025																																																						
PAKET PEKERJAAN: PENGADAAN RENEWAL LICENSE VIRTUAL MEETING BAWASLU TAHUN 2025	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan: UND/PJP/05/05.048/2025 Tanggal 7 Mei 2025																																																						
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Penetapan Penyedia: BA-05/PJP/05/05.048/2025 Tanggal 19 Mei 2025																																																						
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana di atur dalam SPK ini.																																																						
Sumber Dana: DIPA BAWASLU RI Tahun Anggaran 2025 Nomor: 115.01.1.500100/2025 Revisi ke 01 tanggal 21 Februari 2025 MAK 115.01.WA.4356.EBA.963.103.A.522119																																																							
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 14 (empat belas) hari kalender, 23 Mei s.d 5 Juni 2025																																																							
NILAI PEKERJAAN																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 55%;">Uraian</th> <th style="width: 5%;">Vol</th> <th style="width: 5%;">Satuan</th> <th style="width: 15%;">Harga Satuan (Rp)</th> <th style="width: 15%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zoom One Business Annual</td> <td>13</td> <td>Paket</td> <td>4.800.000</td> <td>62.400.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zoom Rooms Annual</td> <td>1</td> <td>Paket</td> <td>12.280.000</td> <td>12.280.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1000 Participants Meeting Annual</td> <td>3</td> <td>Paket</td> <td>24.450.000</td> <td>73.350.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Services: • Installation • Troubleshooting • Commissioning • Provisioning • 1 Year Warranty</td> <td>1</td> <td>Paket</td> <td>12.000.000</td> <td>12.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Sub Total :</td> <td>160.030.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">PPN :</td> <td>17.603.300</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Grand Total :</td> <td>177.633.300</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025						1	Zoom One Business Annual	13	Paket	4.800.000	62.400.000	2	Zoom Rooms Annual	1	Paket	12.280.000	12.280.000	3	1000 Participants Meeting Annual	3	Paket	24.450.000	73.350.000	4	Services: • Installation • Troubleshooting • Commissioning • Provisioning • 1 Year Warranty	1	Paket	12.000.000	12.000.000	Sub Total :					160.030.000	PPN :					17.603.300	Grand Total :					177.633.300	
No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)																																																		
Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025																																																							
1	Zoom One Business Annual	13	Paket	4.800.000	62.400.000																																																		
2	Zoom Rooms Annual	1	Paket	12.280.000	12.280.000																																																		
3	1000 Participants Meeting Annual	3	Paket	24.450.000	73.350.000																																																		
4	Services: • Installation • Troubleshooting • Commissioning • Provisioning • 1 Year Warranty	1	Paket	12.000.000	12.000.000																																																		
Sub Total :					160.030.000																																																		
PPN :					17.603.300																																																		
Grand Total :					177.633.300																																																		
Terbilang: Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah																																																							
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir																																																							
Untuk dan atas nama BAWASLU RI Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi,  Yunanto Dwi Prabowo NIP. 19870623 201403 1 002	Untuk dan atas nama penyedia PT. Gwen Tekno Pratama,  Ria Anengsih Destika Direktur																																																						

SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK;
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan);
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku;
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK;
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini;
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP;
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda;
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang;
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK;
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrian dari produsen pabrian (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja;
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang;
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual;
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut;
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia;
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) Biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [*pembayaran secara sekaligus*];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
 - 4) pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan langsung ke rekening penyedia pada:

Nama Bank : BJB
Nama Rekening : PT. Gwen Tekno Pratama
Nomor Rekening : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]

- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK :
Nama : PPK Pusat Data dan Informasi Bawaslu RI
Alamat : Gd. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Jl. MH. Thamrin No. 14
Jakarta Pusat
Website : www.bawaslu.go.id
Fax : 021-3907911 / 3907912
- Penyedia :
Nama : PT. Gwen Tekno Pratama
Alamat : Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec.
Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
Email : info@gwen.id
Fax : -
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : Yunanto Dwi Prabowo
Untuk Penyedia : Ria Anengsih Destika
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Masa Pelaksanaan Pekerjaan Barang/Jasa: Tanggal 23 Mei s.d 5 Juni 2025
- D. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pekerjaan Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025 ini dibiayai dari DIPA BAWASLU RI Tahun Anggaran 2025 Nomor : 115.01.1.500100/2025
- E. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus
Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: setelah Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Kuitansi, FC NPWP dan FC Nomor Rekening
- F. Denda** Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari [harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]
- G. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:
"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

NOMOR: PPK.04/A/05/05.048/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Yunanto Dwi Prabowo

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK.03/A/05/05.048/2025 tanggal 22 Mei 2025, bersama ini memerintahkan:

PT. Gwen Tekno Pratama

Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275

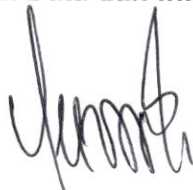
yang dalam hal ini diwakili oleh: Ria Anengsih Destika, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025
2. Tanggal Mulai Kerja : 23 Mei 2025
3. Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian : 14 (empat belas) hari kalender, mulai tanggal 23 Mei s.d 5 Juni 2025
5. Hasil Pekerjaan : Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025

Jakarta, 23 Mei 2025

Untuk dan atas nama BAWASLU RI
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi,



Yunanto Dwi Prabowo
NIP. 19870623 201403 1 002

Untuk dan atas nama penyedia
PT. Gwen Tekno Pratama,



Ria Anengsih Destika
Direktur

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BAST)

NOMOR: PPK.05/A/05/06.048/2025

Pada hari ini KAMIS tanggal LIMA bulan JUNI tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (05-06-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Yunanto Dwi Prabowo :

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pusat Data dan Informasi Bawaslu berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Nomor: 11/KU.01.00/SJ/01/2025 tanggal 22 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Ria Anengsih Destika :

Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang berkedudukan di Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan berupa Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: SPK.03/A/05/05.048/2025 tanggal 22 Mei 2025, dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. Gwen Tekno Pratama,



Ria Anengsih Destika
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi,



Yunanto Dwi Prabowo
NIP. 19870623 201403 1 002

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

NOMOR: PPK.06/A/05/06.048/2025

Pada hari ini SELASA tanggal SEPULUH bulan JUNI tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (10-06-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Yunanto Dwi Prabowo :

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pusat Data dan Informasi Bawaslu berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Nomor: 11/KU.01.00/SJ/01/2025 tanggal 22 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Ria Anengsih Destika :

Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang berkedudukan di Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor PPK.05/A/05/06.048/2025 tanggal 5 Juni 2025, **PIHAK PERTAMA** menyetujui dengan baik pekerjaan Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025 tersebut, sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK.03/A/05/05.048/2025 tanggal 22 Mei 2025.

Untuk itu **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp.177.633.300,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah)** dan **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran tersebut.

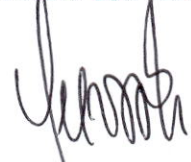
Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. Gwen Tekno Pratama,



Ria Anengsih Destika
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi,



Yunanto Dwi Prabowo
NIP. 19870623 201403 1 002

KUITANSI

Nomor: 017/KP-BAWASLU/GTP/Q2/VI/2025

Sudah Terima Dari : PPK Pusat Data dan Informasi Bawaslu RI
Uang Sebesar : Rp.177.633.300,-
Terbilang : #Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah#
Untuk Pembayaran : Biaya Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025 tanggal 23 Mei s.d 5 Juni 2025, sesuai dengan:
1. SPK Nomor : SPK.03/A/05/05.048/2025
Tanggal 22 Mei 2025
2. BAST Nomor : PPK.05/A/05/06.048/2025
Tanggal 5 Juni 2025
3. BAP Nomor : PPK.06/A/05/06.048/2025
Tanggal 10 Juni 2025

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi,



Yunanto Dwi Prabowo
NIP. 19870623 201403 1 002

Bandung, 10 Juni 2025

PT. Gwen Tekno Pratama,



Ria Anengsih Destika
Direktur

Nomor : 017/SPP-GTP/Q2/VI/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran

Bandung, 10 Juni 2025

Kepada Yth,
PPK Pusat Data dan Informasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jl. MH. Thamrin No. 14
Jakarta Pusat 10350

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025.

Sesuai dengan :
SPK Nomor : SPK.03/A/05/05.048/2025
Tanggal : 22 Mei 2025

Maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran sebesar :
Rp. 177.633.300,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah)

Dan pembayaran tersebut mohon di transfer ke rekening :

Nama Perusahaan : PT. GWEN TEKNO PRATAMA
Nomor Rekening : 
Bank : Bank BJB Cabang S. PARMAN

Sebagai kelengkapan persyaratan penagihan, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- Kuitansi
- Invoice
- e-Faktur Pajak

Demikian permohonan ini kami buat, untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Gwen Tekno Pratama


Ria Anengsih Destika
Direktur



PT. GWEN TEKNO PRATAMA

e-mail : info@gwen.id

Jl. Terusan Martanegara No. 11 Kel. Gumuruh

Kec. Batununggal

Bandung 40275 - Indonesia

Telp. 022-73512118

Server - Storage - CCTV

Software - Network

INVOICE

0017/INV-GTP/Q2/VI/2025

Kepada Yth,

PPK Pusat Data dan Informasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jl. MH. Thamrin No. 14

Jakarta Pusat 10350

SPK No : SPK.03/A/05/05.048/2025

Tanggal : 22 Mei 2025

NO.	DESCRIPTION	QTY	Unit Price (Rp)	Total Price (Rp)
1	Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025	1	160.030.000	160.030.000
Sub Total				Rp 160.030.000
PPN 11%				Rp 17.603.300
Grand Total				Rp 177.633.300

Terbilang : #Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah#

REKENING PT GWEN TEKNO PRATAMA
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB)
Cabang S.Parman Jakarta Barat
[REDACTED]

Bandung, 10 Juni 2025

Hormat kami,

PT. Gwen Tekno Pratama


Ria Anengsih Destika
Direktur

Faktur Pajak

Nama: GWEN TEKNO PRATAMA
Alamat: TERUSAN MARTANEGARA NO.11, KOTA BANDUNG #0317845196429000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002500160686969			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : GWEN TEKNO PRATAMA Alamat : TERUSAN MARTANEGARA NO.11, RT 001, RW 008, GUMURUH, BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40275 NPWP : ██████████			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM Alamat : JL MH THAMRIN NO.14, RT 000, RW 000, GONDANGDIA, MENTENG, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10350 #0001337625335000000000 NPWP : 0001337625335000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: KEUANGAN@BAWASLU.GO.ID			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025 Rp 160.030.000,00 x 1,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	160.030.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			160.030.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			146.694.167,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			17.603.300,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA BANDUNG, 10 Juni 2025



Ditandatangani secara elektronik
RIA ANENGSIH DESTIKA

(Referensi:)

**PT Gwen Tekno Pratama**

Jln.Trs. Martanegara No. 11 Kel Gumuruh Kec. Batununggal Bandung 40275

Phone: (022)73512118

1/1

DELIVERY ORDER

Delivery Order No : 013/DO-GTP/Q2/06/2025

Delivery Order Date : 05/06/2025

Sales Order No : 0013/SO-GTP/Q2/05/2025

Customer : BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia)

Address : Jalan MH. Thamrin No.14 Jakarta Pusat 10350

Order No : SPK.03/A/05/05.048/2025

Order Date : 22/05/2025

Phone : (021) 3905889

Up : Bapak Yunanto Dwi Prabowo

No.	Part Number	Descriptions	Qty	Unit
1	PAR1-BIZ-BAZE-NH1Y	Zoom One Business Annual	13,00	Paket
2	PAR1-ROOM-BASE-RM1Y	Zoom Rooms Annual	1,00	Paket
3	PAR1-LMR-1K-NH1Y	1000 Participants meeting Annual	3,00	Paket
4	Services	Services: <ul style="list-style-type: none">• Installation• Troubleshooting• Commissioning• Provisioning• 1 Year Warranty	1,00	Paket

Remarks : Pengadaan Renewal License Virtual Meeting Bawaslu Tahun 2025

Prepared By,

(Diana)

Delivery By,

(Daniel P)

Bandung, 05 Juni 2025

Received By,

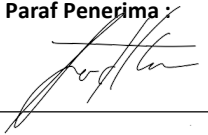
(Aan M. Fardhan)

CHECKLIST BARANG

ORDER NUMBER : SPK.03/A/05/05.048/2025
ORDER DATE : 22 Mei 2025
DELIVERY ORDER NUMBER : 013/DO-GTP/Q2/06/2025
DELIVERY DATE : 05 Juni 2025

No	Spesifikasi	Qty	Satuan	Serial Number	Checklist	
					Sesuai	Tidak Sesuai
Periode 06 Juni 2025 s/d 06 Juni 2026						
1	Zoom One Business Annual	13	Paket			
2	Zoom Rooms Annual	1	Paket			
3	1000 Participants Meeting Annual	3	Paket			
4	Services: <ul style="list-style-type: none">• Installation• Troubleshooting• Commissioning• Provisioning• 1 Year Warranty	1	Paket			

Paraf Pengirim :


Paraf Penerima :


Congratulations your account has been activated!

Account Details

Account Name	Account Owner	Account Number	Account Type
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	[REDACTED]	[REDACTED]	Business

Plan Details

Plan Name	Qty	Details	Period	Subscription Start	Subscription End	Status
Zoom Workplace Business	13 license(s)	Bundled features	Annual	Jun 6, 2025	Jun 6,2026	Active
Zoom Rooms	1 Room	--	Annual	Jun 6, 2025	Jun 6,2026	Active
Large Meeting	3 license(s)	1,000 participants	Annual	Jun 6, 2025	Jun 6,2026	Active

Sold To Contact

Company	PT. Gwen Tekno Pratama
Contact Name	Mrs. Rhia
Email	[REDACTED]
Address	Jln.Trs. Martanegara No. 11 Kel Gumuruh Kec. Batununggal Bandung 40275.



ZOOM WORKPLACE

Zoom Workplace Business

QTY	SUBSCRIPTION PERIOD	SERVICE EFFECTIVE DATE	STATUS	NEXT INVOICE DATE:
13	Annual	Jun 6, 2025	Active	Jun 6, 2026
				NEXT INVOICE AMOUNT: --

Each Zoom Workplace Business license includes:

- Zoom Workplace
- Zoom Team Chat
- Mail
- Calendar
- Custom Avatars
- Notes
- Tasks
- AI Companion
- Cloud Recording Storage
- Workflow Automation

[View Details](#)



Clock



7:52 PM

Local time
6/7/2025



ZOOM ROOMS

Zoom Rooms

QTY	SUBSCRIPTION PERIOD	SERVICE EFFECTIVE DATE	STATUS	NEXT INVOICE DATE:
1	Annual	Jun 6, 2025	Active	Jun 6, 2026
				NEXT INVOICE AMOUNT: --



LARGE MEETING

Large Meeting

1,000 participants

QTY	SUBSCRIPTION PERIOD	SERVICE EFFECTIVE DATE	STATUS	NEXT INVOICE DATE:
3	Annual	Jun 6, 2025	Active	Jun 6, 2026
				NEXT INVOICE AMOUNT: --



Clock



7:52 PM

Local time
6/7/2025

To learn about more of Zoom's offerings or to purchase a plan, contact your reseller at nafi@kayreach.com; handryb@kayreach.com;